

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama yang dialami oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan diartikan sebagai kondisi sosial ekonomi di mana hak-hak dasar individu atau kelompok tidak terpenuhi, sehingga mereka tidak mampu menjaga atau meningkatkan kualitas hidup yang layak dan bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi kebutuhan akan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, akses ke sumber daya alam, lingkungan yang sehat, rasa aman dari ancaman kekerasan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Pratiwi Utami, 2025).

Kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia. Masalah ini cukup rumit dan sering terjadi dari generasi ke generasi. Menurut Todaro (2011), kemiskinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketika seseorang memiliki penghasilan di bawah batas minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka orang itu dianggap miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah ketika pendapatan seseorang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata orang di sekitarnya. Meskipun orang tersebut bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, dia tetap dianggap miskin karena pendapatannya lebih kecil dari kebanyakan orang di lingkungan tersebut (Febrianti et al., 2024).

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Hal ini

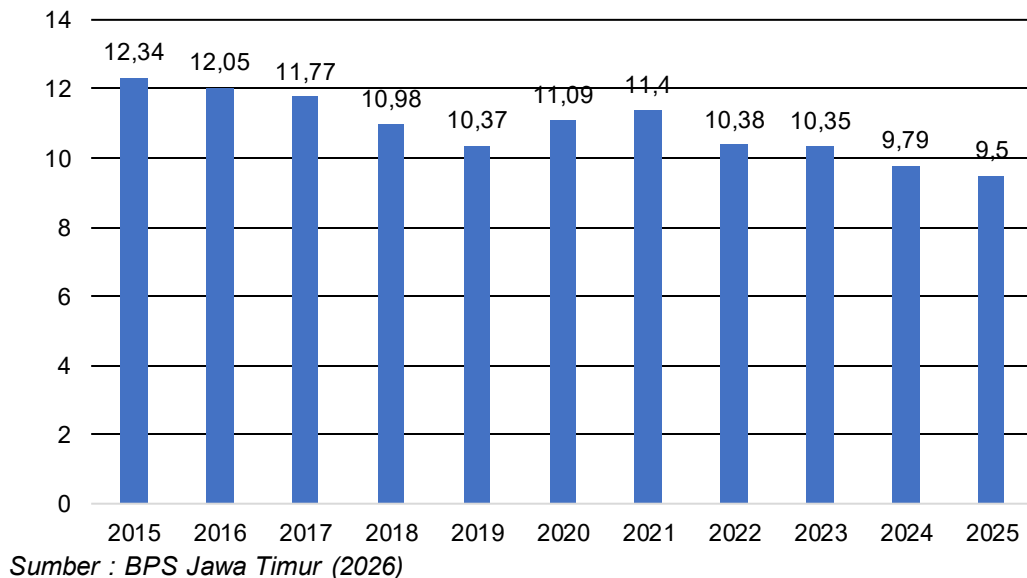
diukur berdasarkan pengeluaran individu, dengan fokus pada rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan tersebar merata baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, meskipun tingkat kemiskinan di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (Istiyani et al., 2024). Menurut Khan, dalam (Irsyad, 2023) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan di pedesaan sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Artinya, kemiskinan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dari berbagai bidang, seperti aspek budaya yang memengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakat, kondisi iklim yang berdampak pada produktivitas pertanian, dinamika pasar yang menentukan akses dan harga barang, perbedaan peran dan kesempatan berdasarkan gender, serta kebijakan politik yang dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan di pedesaan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor untuk mengatasi akar permasalahan yang beragam tersebut.

Saat ini, hampir seluruh negara menghadapi tantangan kemiskinan yang menghambat kemajuan bangsa. Masalah ini lebih sering terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, angka kemiskinan masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian utama pemerintah hingga kini (Wiadnyana & Hadiyati, 2023). Tingkat kemiskinan di suatu daerah biasanya diukur dengan menggunakan persentase penduduk miskin. Persentase ini memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi penduduk miskin dibandingkan dengan total penduduk di wilayah tersebut. Jika persentase kemiskinan tinggi, berarti jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga banyak, sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut masih rendah (Fitriyanti &

Handayani, 2020). Sebaliknya, persentase kemiskinan yang rendah menunjukkan jumlah penduduk miskin sedikit dan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik.

Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi nasional. Namun, kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh semua provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan data kemiskinan, tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, dengan Jawa Timur berada di posisi ketiga (Ayong Kusuma et al., 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius (M. H. Rakhmawan & T. S. Aji, 2022). Selain itu, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena jumlah penduduknya yang besar, wilayah administrasinya yang luas, serta tingkat disparitas pembangunan antar daerah yang cukup tinggi. Perbedaan kondisi sosial ekonomi di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur menyebabkan variasi tingkat kemiskinan, sehingga menarik untuk diteliti guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di wilayah tersebut.

Gambar 1. 1 Rata Rata Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2025 (Persen)



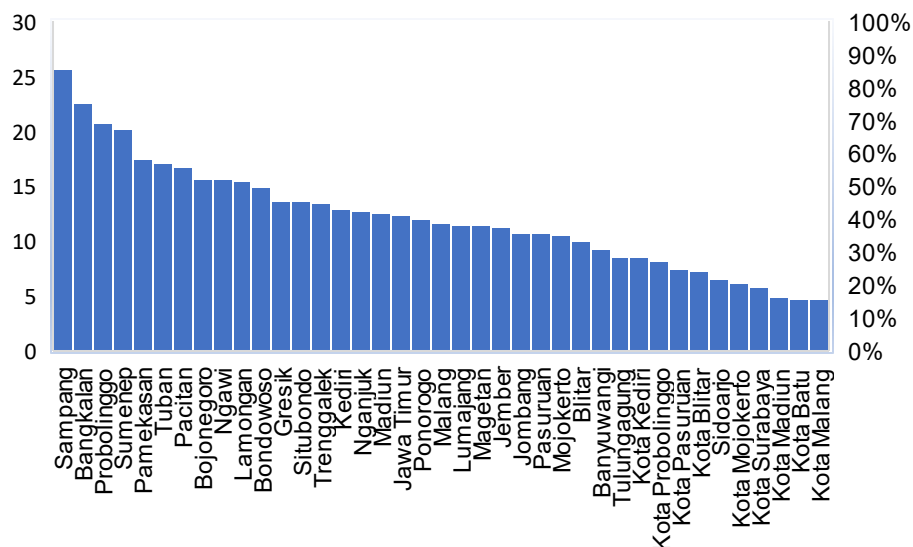
Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren penurunan dari 12,05% pada tahun 2016 menjadi 9,5% pada tahun 2025. Penurunan ini sempat terhenti dan berbalik naik selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, dengan angka kemiskinan mencapai 11,09% dan 11,4%. Namun, setelah itu terjadi penurunan kembali seiring dengan pemulihan ekonomi, sehingga pada tahun 2024 dan 2025 persentase penduduk miskin turun menjadi masing-masing 9,79% dan 9,5%. Hal ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat pasca pandemi.

Perkembangan indikator kemiskinan dapat dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin. Kedua indikator tersebut menunjukkan tren positif di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir, dengan penurunan baik dari segi jumlah maupun persentase. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 4,112 juta jiwa, yang kemudian menurun menjadi sekitar 3,876 juta jiwa pada Maret 2025. Dengan demikian, terjadi penurunan absolut sekitar 0,236 juta jiwa selama periode tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik juga mengonfirmasi

bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,876 juta orang dengan persentase 9,50% (BPS, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kabupaten-kabupaten tersebut dipilih karena dinilai dapat menggambarkan kondisi wilayah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data hingga tahun 2025 yang merupakan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur serta perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2025)

Gambar 1.2 Penduduk Miskin Kab/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
(Persen)

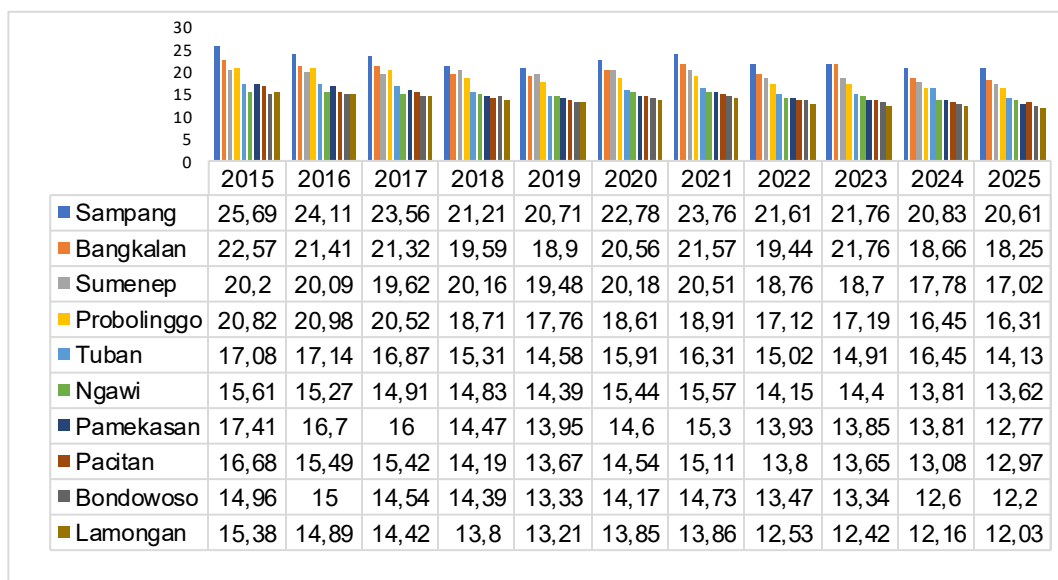


Sumber : Data BPS(2026)

Gambar 1.2 Menunjukkan bahwa Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sampang tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya dengan persentase sekitar 20,83% dari total penduduknya berdasarkan angka ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari lima penduduk di

kabupaten tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Sampang dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim dan harga komoditas, terbatasnya infrastruktur, serta akses yang kurang terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Ketidakberagaman lapangan pekerjaan selain sektor primer juga turut memperparah tingkat pengangguran dan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di wilayah ini.

Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan 10 Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2015-2025
(Persen)



Sumber : BPS Jawa Timur (2026)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 10 kabupaten di Provinsi Jawa Timur cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2025. Pada tahun 2015, Kabupaten Sampang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu 25,69%, sementara kabupaten lain juga masih memiliki angka yang cukup tinggi. Dari 2015 sampai 2019, terjadi penurunan kemiskinan secara bertahap. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021, tingkat kemiskinan naik di sebagian besar kabupaten akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, mulai tahun 2022 hingga 2025,

kemiskinan kembali menurun seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan karena kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur, terutama di beberapa kabupaten yang secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Sepuluh kabupaten yang menjadi fokus penelitian yaitu Sampang, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Tuban, Ngawi, Pamekasan, Pacitan, Bondowoso, dan Lamongan. dipilih karena memiliki persentase penduduk miskin yang cukup besar dibandingkan daerah lain di Jawa Timur selama periode penelitian.

Kabupaten-kabupaten di Pulau Madura seperti Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan mendapat perhatian khusus karena tingkat kemiskinannya cenderung lebih tinggi dan berlangsung terus-menerus dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan keterbatasan dalam pembangunan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kesempatan kerja, serta ketidakmerataan infrastruktur dan akses pelayanan publik. Sementara itu, Kabupaten Probolinggo, Tuban, Ngawi, Pacitan, Bondowoso, dan Lamongan juga dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, namun tetap menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup serius.

Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antar wilayah ini membuat penelitian menjadi menarik, karena dapat memberikan gambaran tentang perkembangan tingkat kemiskinan di daerah dengan karakteristik yang beragam. Selain itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, merata, dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Faradila & Imaningsih,

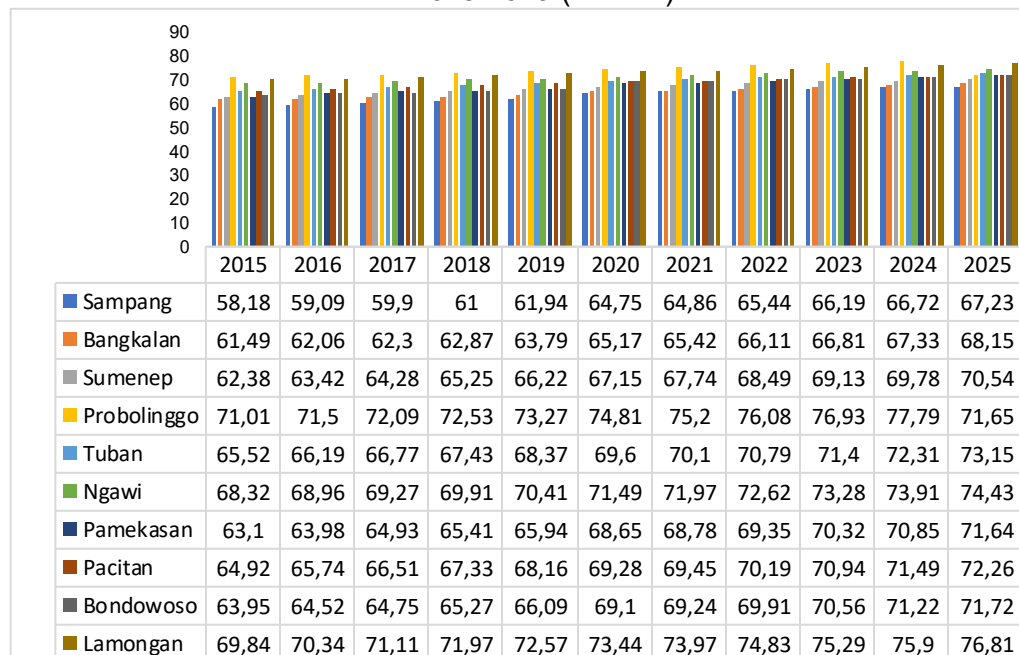
2022) merata, dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Faradila & Imaningsih, 2022).

Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah tersebut menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi hasil pembangunan, sehingga sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Pendidikan yang terbatas menghambat kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan penghasilan, sementara kurangnya akses kesehatan dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai membatasi mobilitas, akses pasar, dan kesempatan usaha, sehingga memperparah kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata (Ardina, 2024). Pendekatan ini penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalisir dan pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Selain faktor demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas hidup masyarakat. Menurut (Febrianti et al., 2024), IPM mencerminkan tingkat pencapaian suatu wilayah dalam bidang

kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat. Kabupaten-kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi biasanya menunjukkan nilai IPM yang rendah, yang mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Menandakan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan itu, Lamaile (2022) menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dijadikan prioritas utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena tanpa adanya peningkatan kualitas manusia, sulit bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan sangat penting untuk mendorong peningkatan IPM dan pada akhirnya memperbaiki taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia 10 Kabupaten di Jawa Timur tahun 2015-2025 (Persen)



Sumber : BPS Jawa Timur (2026)

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sepuluh kabupaten miskin di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015 hingga 2025. Secara umum, nilai IPM di semua kabupaten menunjukkan peningkatan setiap tahun, yang mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Kabupaten Sampang memiliki nilai IPM terendah dibandingkan kabupaten lain, namun tetap meningkat dari 58,18 pada tahun 2015 menjadi 67,23 pada tahun 2025. Di sisi lain, Kabupaten Probolinggo dan Lamongan berada di posisi dengan nilai IPM tertinggi pada akhir periode penelitian. Peningkatan IPM ini menandakan kemajuan pembangunan manusia di daerah-daerah miskin Jawa Timur, meskipun kesenjangan antarwilayah masih ada dan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyanti & Handayani, 2020) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan daerah. Selain itu, (Wiadnyana & Hadiyati, 2023) juga menemukan bahwa variabel pendidikan dan kualitas sumber daya manusia memiliki kontribusi penting dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Dengan demikian, meskipun IPM di seluruh kabupaten mengalami peningkatan, perbedaan capaian antarwilayah masih menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan

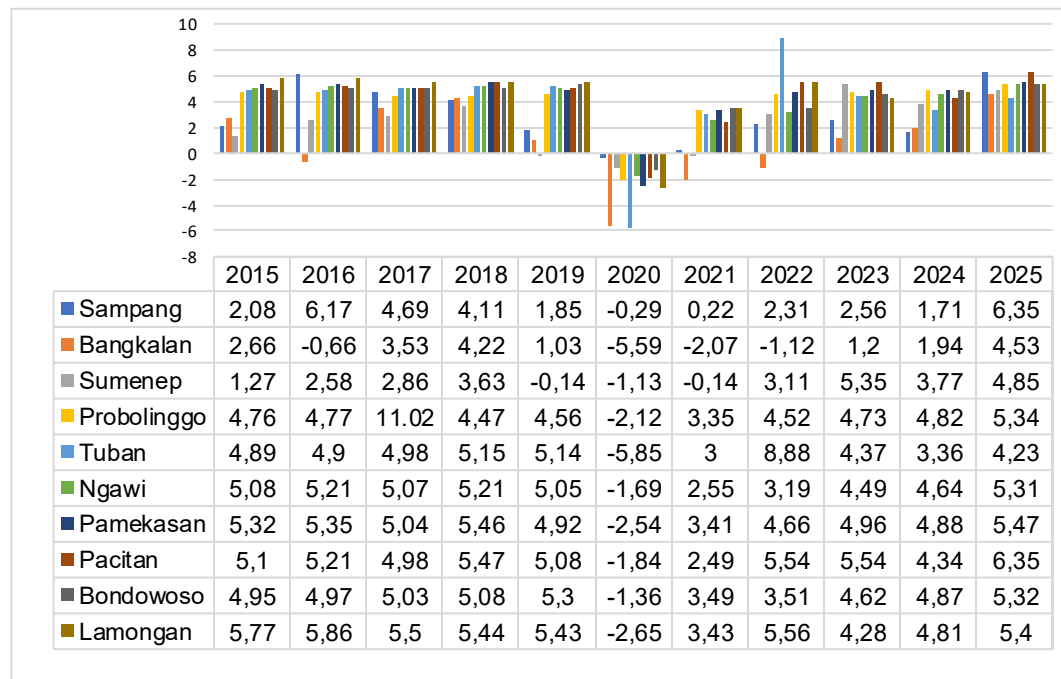
direpresentasikan oleh tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi ekonomi tercermin dari kemampuan daya beli atau pengeluaran riil per kapita masyarakat. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain, sehingga peningkatan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli secara simultan akan mendorong kenaikan nilai IPM. Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, semakin baik pula kualitas pembangunan manusianya, yang pada akhirnya mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Febrianti et al., 2024).

Selain IPM, laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang berperan utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Wijayanti & Aisyah, 2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya dapat membantu mengurangi angka kemiskinan, terutama apabila disertai dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Namun demikian, dalam banyak situasi, peningkatan PDRB tidak selalu berarti penurunan kemiskinan yang signifikan jika hasil pembangunan tidak didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB merupakan total faktor produksi yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu daerah. Semakin besar pula penerimaan wilayah tersebut. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah PDRB per kapita. Pendapatan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan dasar. Pendapatan masyarakat suatu wilayah dapat diukur melalui pendapatan per kapita, menurut Todaro (2006). Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk di

suatu wilayah dalam periode tertentu, yang dihitung dengan membagi total pendapatan periode tersebut dengan jumlah populasi di wilayah itu, menurut Sukirno (2019). Jika pendapatan masyarakat menurun, maka akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang dijelaskan oleh (Nur Azizah & Nur Asiyah, 2022). Semakin tinggi PDRB per kapita di suatu wilayah, semakin besar potensi penerimaan daerah tersebut karena pendapatan masyarakatnya juga tinggi (Hidayat et al., 2024)

Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan Tahun 2015-2025



Sumber : BPS 2026

Gambar ini menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 10 kabupaten miskin di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2025. Sebelum tahun 2020, sebagian besar kabupaten mengalami pertumbuhan PDRB yang relatif stabil dengan rata-rata antara 4–6 persen. Namun, pada tahun 2020, seluruh kabupaten mengalami kontraksi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, dengan penurunan terbesar terjadi di Kabupaten

Tuban sebesar -5,85 persen, diikuti Bangkalan dengan -5,59 persen. Setelah masa pandemi, pada periode 2021–2025, pertumbuhan PDRB mulai kembali meningkat di seluruh kabupaten, bahkan beberapa daerah seperti Tuban menunjukkan pemulihan yang signifikan dengan pertumbuhan mencapai 8,88 persen pada tahun 2022, menunjukkan bahwa perekonomian di kabupaten-kabupaten miskin di Jawa Timur mulai pulih dan berkembang kembali setelah tekanan pandemi.

Tingginya jumlah penduduk miskin adalah besarnya angka pengangguran di suatu daerah. Pengangguran dapat terjadi karena bertambahnya angkatan kerja baru setiap tahun, sementara kesempatan kerja yang tersedia tidak mengalami peningkatan. Masalah pengangguran semakin parah akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dan jumlahnya yang sangat besar (Sukirno, 2017). Selain itu, kebangkrutan industri yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja juga berkontribusi pada meningkatnya pengangguran. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula jumlah penduduk miskin. Pengangguran merupakan kondisi di mana penambahan tenaga kerja tidak sebanding dengan penambahan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi baru. Dalam ilmu demografi, orang yang aktif mencari pekerjaan termasuk dalam kategori angkatan kerja (Ayong Kusuma et al., 2022).

Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2025 (Persen)

Sumber : BPS 2026

Gambar 1.6 ini menunjukkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 10 kabupaten di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015–2025. Secara umum, tingkat pengangguran di setiap kabupaten mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Sebelum pandemi, tingkat pengangguran di sebagian besar kabupaten relatif stabil. Namun, pada tahun 2020–2021 terjadi peningkatan pengangguran di hampir seluruh wilayah akibat melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19. Kabupaten Bangkalan mencatat tingkat pengangguran tertinggi, mencapai 8,77% pada tahun 2020. Pada periode 2022–2025, tingkat pengangguran mulai menurun di sebagian besar kabupaten, mencerminkan pemulihan ekonomi dan bertambahnya peluang kerja setelah pandemi. Meskipun demikian, perbedaan tingkat pengangguran antar wilayah masih ada, sehingga diperlukan upaya untuk meratakan kesempatan kerja di seluruh daerah.

BPS (2024) mengungkapkan bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh TPT. TPT memiliki hubungan erat dan berkontribusi terhadap kenaikan angka kemiskinan. Menurut (Wijayanti & Aisyah, 2022) pengangguran berdampak negatif terhadap kemiskinan. Ketika seseorang menganggur, penghasilannya menurun drastis, yang pada gilirannya memengaruhi keberhasilan ekonomi mereka. Penurunan kesejahteraan akibat pengangguran meningkatkan risiko seseorang terperangkap dalam kemiskinan karena tidak adanya pendapatan yang memadai. Hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah, maka produktivitas penduduknya juga menurun, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini kemudian berpotensi menyebabkan peningkatan kemiskinan.

Faktor penyebab lainnya kemiskinan adalah pengangguran, yang merupakan masalah ekonomi makro dengan dampak langsung dan serius bagi individu. Menurut Mankiw (2019), kehilangan pekerjaan seringkali menyebabkan penurunan standar hidup serta tekanan psikologis yang berat. Badan Pusat Statistik TPT sebagai indikator untuk mengukur kondisi pengangguran. Pengangguran memberikan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan individu. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, semakin besar pula tingkat kemiskinan yang dialami. Selain itu, menurunnya semangat akibat pengangguran juga meningkatkan risiko seseorang jatuh ke dalam kemiskinan (Rohman et al., 2021)

Beberapa studi sebelumnya telah meneliti hubungan antara IPM, pertumbuhan PDRB, TPT, dan kemiskinan, yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Menurut (Wibowo & Ridha, 2025) IPM memiliki pengaruh negatif

signifikan terhadap kemiskinan, sementara TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja dalam mengurangi kemiskinan nasional. Penelitian (Fitria, 2021) menunjukkan bahwa PDRB, IPM, dan TPT secara bersama-sama memengaruhi tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan keterkaitan ketiga variabel tersebut dalam konteks regional meskipun wilayah penelitiannya berbeda. Selain itu, studi oleh (Tina Angelia et al., 2025) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sementara IPM dan TPT tidak berpengaruh signifikan secara parsial, tetapi secara simultan ketiga variabel berkontribusi terhadap kemiskinan di wilayah tersebut, menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam konteks tertentu. (Pratama & Hendrawan, 2024) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh PDRB dan TPT bervariasi tergantung periode dan kondisi wilayah. Hasil penelitian (Azka Aulia, 2025) mempelajari dampak laju pertumbuhan penduduk, IPM, dan laju PDRB terhadap kemiskinan. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan variabel terkait kondisi ketenagakerjaan, TPT. Padahal, pengangguran merupakan faktor penting yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan variabel TPT untuk melengkapi analisis agar dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Perbedaan dan kesenjangan hasil penelitian terkait pengaruh Indeks IPM, pertumbuhan PDRB, dan TPT terhadap kemiskinan mendorong peneliti untuk melakukan pengujian ulang hubungan antar variabel tersebut. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif signifikan

terhadap kemiskinan, namun penelitian lain menemukan hasil yang berbeda. Begitu pula dengan pertumbuhan PDRB dan TPT, yang dalam beberapa penelitian berpengaruh signifikan, tetapi pada studi lain tidak menunjukkan pengaruh yang konsisten. Selain itu, mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan cakupan wilayah yang luas, seperti tingkat nasional atau seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan periode penelitian yang relatif terbatas.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya karena secara khusus meneliti 10 kabupaten miskin di Provinsi Jawa Timur, dengan periode waktu yang lebih panjang yaitu 2015–2025, serta menerapkan metode Regresi *GMM (Generalized Method of Moments) Arellano-Bond*. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati dinamika kemiskinan secara lebih komprehensif dan menguji variabel IPM, pertumbuhan PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan dalam satu model analisis data panel. Berdasarkan latar belakang Oleh karena itu, model yang digunakan akan menghasilkan estimasi yang tidak bias, konsisten, dan efisien, yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan parameter dalam model persamaan simultan. Hal ini memungkinkan penentuan hubungan antara dampak jangka pendek dan jangka panjang serta respons positif setiap variabel terhadap guncangan pada variabel lain. Adanya kesenjangan penelitian, penulis bermaksud melakukan studi dengan judul **“Dinamika Kemiskinan Daerah: Peran IPM, Pertumbuhan PDRB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten Miskin di Jawa Timur.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ialah :

1. Apakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam memahami dinamika kemiskinan di daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan

PDRB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan pada tingkat kabupaten, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya di 10 kabupaten termiskin, dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang program pembangunan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta penciptaan lapangan kerja.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa serta menjadi tambahan literatur terkait analisis kemiskinan berbasis data panel pada tingkat daerah.

4. Manfaat Bagi Universitas Bojonegoro

Hasil penelitian ini dapat menambah arsip kepustakaan Fakultas Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Universitas Bojonegoro.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Subjek dan Objek penelitian adalah 10 kabupaten Miskin di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ngawi,

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Lamongan

2. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2015 hingga 2025.
3. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemiskinan dalam persentase.
4. Variabel independen meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (%) pertumbuhan PDRB, dan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
5. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS)
6. Penelitian ini tidak memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemiskinan seperti ketimpangan pendapatan, inflasi, belanja pemerintah, maupun faktor sosial lainnya